

PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN

Mahnun Marbawi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: marbawi1973@gmail.com

Abstrak

Pendidikan di era globalisasi seharusnya menekankan pada tumbuhnya pribadi yang terikat kepada norma-norma etnisitas atau kearifan lokal yang berkembang sesuai perkembangan zaman dan pribadi yang mempunyai identitas sebagai kelompok bangsa tertentu. Untuk menumbuhkan pribadi yang memiliki identitas budaya dalam menghadapi globalisasi tersebut dibutuhkan pendidikan yang transformatif, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan pribadi dalam memilih secara personal berbagai pengaruh di era globalisasi saat ini. Dasar-dasar local wisdom yang utama tersebut adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ideology genuine bangsa yang digali dari sejarah panjang dan budaya asli Indonesia. Pancasila seharusnya menjadi identitas bangsa Indonesia yang bhinneka. Sebagai idologi, Pancasila digali dari khazanah kebudayaan, sejarah kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih tetap aktual dan relevan dengan kehidupan saat ini dan yang akan datang, termasuk dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Ideologi, pancasila, dan pendidikan

PENDAHULUAN

Carlo Fanelli dan Bryan Evans (2015: p. 11) menyebutkan saat ini menjadi era *Golden Age of Capitalism*, yaitu masa di mana meningkatnya produktivitas dan akumulasi kapital dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan tujuan ekonomi termasuk pendidikan. Pendidikan dalam pandangan "*age of capitalism*" ini tidak hanya menyediakan lulusan dengan kemampuan atau keahlian tetapi juga mengajak siswa untuk memahami dan memasuki aturan disiplin seorang pekerja (dunia kerja/dunia industri). Ini artinya pendidikan dalam sistem kapitalis sudah diarahkan untuk kebutuhan industri kapitalis.

Dalam editorialsnya di jurnal *Alternate Routes*, Carlo Fanelli dan Bryan Evans (2015: 13) juga menyebutkan bahwa

kaum fondamentalis neoliberalis memiliki pandangan bahwa pendidikan sebagai komodifikasi (barang dagangan) yang dapat diperjual-belikan di pasar dengan orientasi keuntungan dari alokasi sumber daya. Masih dalam ulasannya, Carlo Fanelli dan Bryan Evans, menggambarkan sistem sekolah umum (*public*) harus berlari (melayani dengan sigap) seperti rumah makan yang menyiapkan standard minimum.

Sekolah dalam pandangan kapitalis tidak lebih dari jasa penyedia calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan industri. Sekolah hanya menjadi komodifikasi dari kebutuhan industri dalam menyediakan kebutuhan tenaga pekerja. Lebih lanjut, Carlo Fanelli dan Bryan Evans, mengutip As Kumar: "Pendidikan lebih dari sekedar struktur institusi formal dan transaksi di

ruang kelas. Ruang kelas akan didominasi oleh kepentingan sosial yang melingkupinya" (Fanelli & Evan, 2015: 16).

Dari sini jelas terlihat bahwa dalam proses pendidikan dan pembuatan kebijakan pendidikan selalu memiliki muatan ideologi. Dan saat ini ideologi kapitalis cukup dominan dalam praksis pendidikan di tanah air. Kapitalisme pendidikan akan melahirkan komersialisasi pendidikan yaitu proses pendidikan yang mementingkan biaya tinggi dan sarana prasarana pendidikan, tanpa memikirkan kualitas (Bakar, 2012: 150).

Praksis pendidikan menjadi alat dari penguatan ideologi. Sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan bisa dijadikan alat negara untuk melanggengkan ideologi, eksistensi dan identitas bangsa. Pendidikan adalah alat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah alat negara untuk memajukan kehidupan bangsa yang beradab dan berdaya saing. Pendidikan adalah alat negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Pendidikan adalah alat negara untuk melakukan revolusi mental.

Tag line di atas sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dan sejalan dengan *prembule* Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu *tag line* di atas adalah janji yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan utama janji yang direalisasikan dalam kebijakan peningkatan mutu, akses dan relevansi pendidikan dengan strategi pembangunan bangsa.

Pancasila adalah ideology *genuine* bangsa yang digali dari sejarah panjang dan budaya asli Indonesia. Pancasila seharusnya menjadi identitas bangsa Indonesia yang *bhinneka*. Dalam sebuah dunia yang saling terhubung, Identitas

sebagai sebuah bangsa akan mengalami berbagai benturan dengan arus globalisasi.

Perubahan global yang serba cepat ditandai dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi memberikan dampak yang sangat besar. Terjadi percaturan global antara *earth incorporated* dan *the global mind*. *Earth incorporated* yang ditandai dengan kemunculan *multi national corporation* (Tilaar, 2012: 224,334), meningkatkan eksploitasi sumber daya alam serta melahirkan konsumerisme yang didasarkan pada ekonomi pasar. Sementara *the global mind* yang ditunjang oleh kemajuan komunikasi menjadikan dunia tanpa batas, terbuka lebar dan melahirkan *world brain* yang kemudian melahirkan kesatuan manusia dalam pengakuan hak-haknya. *Multi national corporation*, telah melahirkan kekuasaan modal-modal besar dan ekonomi pasar (Tilaar, 2007: 142-147). Merekalah yang melahirkan kebudayaan tanpa jiwa, sebab orientasi keuntungan (*profit*) menjadi tujuan dari kapitalisme. Pengaruh *earth incorporated* dan *the global mind* ini melupakan kenyataan kehidupan serta identitas diri sebuah bangsa. Padahal, identitas sebuah bangsa adalah budaya bangsa itu sendiri.

Modal budaya yang majemuk tersebut tersebut menjadi identitas bangsa, sebab Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini tampil dalam simbol budaya, bahasa, agama dan keyakinan, pulau, etnis dan berbagai hal yang terkandung di dalamnya. Itulah Indonesia Raya. Kesadaran akan identitas dirinya yang kuat dan terpatri dalam setiap pribadi anak bangsa itulah yang akan menumbuhkan nasionalisme.

Pancasila merupakan suatu konstruk budaya yang digali dari sejarah bangsa ini yang multikultur. Keidealan Pancasila sebagai sebuah konstruk budaya sekaligus identitas bangsa perlu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Konstruk budaya bangsa tersebut akan melahirkan *basic personality* bagi masyarakat suatu bangsa (Nyantes, 2006: 112). Dan penguatan *basic personality* masyarakat Indonesia hanya bisa dilakukan melalui pendidikan (Nyoman Dantes, 2006, 2006). Ini adalah imperatif (sifat memaksa) karena peserta didik dalam abad 21 ini akan menghadapi tantangan baru yang semakin kuat, yaitu rangsangan kemajuan teknologi dan kebudayaan global yang tanpa jiwa.

Justru saat ini pendidikan di Indonesia menganut sistem fungsional dan materialisme. Di mana pendidikan dijalankan untuk memenuhi dunia kerja. Sehingga yang terjadi adalah dunia pendidikan menjadi sebuah industri. Tengok saja bermunculan berbagai sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta yang menawarkan berbagai kualitas tertentu di mana konsumennya adalah kelas elit tertentu, dan kalangan profesional dengan penghasilan yang tinggi. Sekolah-sekolah tersebut menawarkan alumnusnya siap diterima di dunia kerja ini menjanjikan sebuah sistem pendidikan siap pakai dan siap kerja (Anyon, 2011: 65). Model pendidikan sekolah-sekolah yang eksklusif ini bisa dibayangkan menganut paham pendidikan mekanis-marxis. Sebab penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah lain termasuk sekolah yang dikelola pemerintah, diperuntukan bagi seluruh masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi apapun. Bandingkan dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh pihak swasta bermodal besar.

IDEOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum melakukan pendidikan untuk masyarakat Indonesia, Kemendikbud baru melakukan menyekolahkan masyarakat Indonesia (Marbawi, 2016: 35). Jika Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) berorientasi menghasilkan masyarakat terdidik, maka salah satu fokusnya adalah bagaimana menguatkan peran Pancasila sebagai landasan filosofi dalam perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini kondisi kebudayaan kita seolah-oleh terpisah dari pendidikan. Seperti yang pemisahan kebudayaan dari perguruan tinggi, hanya akan menghasilkan intelektual yang *nir* budaya (Tilaar, 2015: 35).

Pendidikan kita minus filosofi pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa belum mendapatkan moment yang kuat dalam kerangka melahirkan masyarakat terdidik. Cita-cita mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu ini masih jauh. Salah satu buktinya adalah kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia menempati peringkat terendah dalam survey terkait sistem pendidikan yang diadakan oleh lembaga di luar pemerintah. Sebagai contoh, Indonesia juga menempati posisi rendah dalam hal budaya membaca buku/literasi (terendah di kawasan Asia Timur). Melihat hal ini, wujudkan masyarakat terdidik kiranya masih jauh dari kenyataan (Survei OECD pada penelitian PISA tahun 2012).

Erat keterkaitan pendidikan dan ideologi Pancasila yang secara garis besar disebutkan bahwa Pendidikan semestinya menguatkan Pancasila sebagai ideologi Negara dan Bangsa Indonesia. Pendidikan adalah menjadi alat Negara untuk menguatkan identitas, dan alat mencerdaskan bangsa. Pendidikan adalah

rekayasa sosial bagi Negara untuk melanggengkan doktrin bernegara dan ideologi. Di mana pendidikan memerlukan keberlangsungan dalam kurun waktu yang lama dalam interaksi *face to face* antara guru dan siswa. Pendidikan juga menjadi alat dari proses pembudayaan dan sekaligus pewarisan budaya dalam sebuah masyarakat (Maarif, 2009: 225).

Keterpurukan pendidikan Indonesia disinyalir karena sejak proklamasi hingga saat ini, strategi kebijakan pendidikan Indonesia tidak pernah mantap (Maarif, 2009: 225). Inilah yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Sebab kualitas manusia dihasilkan dari proses pendidikan yang diselenggarakan di negara tersebut. Kualitas pendidikan juga bisa dilihat dari indeks HDI (*Human Development Indeks*) suatu Negara.

Sebagai Negara yang termasuk dalam kelompok *middle incom*, (Basri, 2013: 151) Indonesia memiliki segudang Pekerjaan Rumah (PR) besar. Indonesia akan terjebak menjadi negara berkembang bahkan akan turun level menjadi ancaman terhadap identitas kebangsaan Indonesia tersebut datang dari gemuruhnya arus budaya global yang menggerus identitas nasional. Sebagai bangsa yang besar, identitas pribadi masyarakat Indonesia masih kabur. Identitas kebangsaan masyarakat Indonesia tidak muncul. Yang dimaksud identitas kebangsaan meminjam penjelasan Margareth Mead yang dikutip Ramzy Same, identitas kebangsaan bisa diartikan "*National Character*" atau "*National Identity*" (Tilaar, 2016: 56, 66).

Identitas kebangsaan masyarakat Indonesia sebagai kepribadian bangsa belum terbentuk dari sistem budaya masyarakat Indonesia. Padahal

nasionalisme Indonesia dikembangkan dari identitas dan budaya lokal/etnis dan puncaknya adalah identitas bangsa Indonesia. Kemunculan identitas budaya lokal/daerah sebagai unsur penting dalam membangun budaya bangsa adalah fondasi identitas dan nasionalisme (Tilaar, 2016: 41, 47) sehingga nasionalisme Indonesia adalah bukan gaya Jawa, Sunda, Batak, Bali, Manado atau lainnya. Tapi Nasionalisme Indonesia adalah *Bhineka Tunggal Ika*.

Nasionalisme dan identitas bangsa Indonesia seharusnya merujuk kepada Pancasila yang saat ini kondisi ideologi Negara tersebut tercabut dan terpisah dari kehidupan masyarakat. Interpretasi Pancasila sejak dikenalkan oleh Sukarno hingga saat ini mengalami *metamorphosis* yang berubah-ubah. Pancasila pada zaman Sukarno diidentikkan dengan sikap gotong royong, pada zaman Suharto dengan interpretasi 36 butir Pancasila dan jargon *Pancasilais* atau *Anti Pancasila*. Dan saat ini Pancasila tidak diinterpretasikan dengan cerdas oleh pemerintah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencanangkan Empat Pilar Bangsa yang kemudian dirubah menjadi Empat Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan *Bhineka Tunggal Ika*. Pancasila tidak menjadi ideologi yang kuat dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Justru ideologi agama dan kelompok yang muncul dan menguatkan identitas masyarakat Indonesia, bukan Pancasila. Seharus Pancasila adalah landasan sikap dan identitas nasionalisme dalam praksis kehidupan masyarakat kita.

Dalam kajian antropologi dikenal istilah *bounded system*, yaitu sebuah proses yang menunjukkan teritorialisasi masyarakat berdasarkan sifat tertentu (bagian daerah tertentu yang telah dibatasi oleh wilayah geografis atau nilai-nilai budaya), (Abdullah, 2006: 186-188).

Pandangan terhadap kelompok sendiri selalu dalam posisi kelompok unggul dan superior. Perasaan unggul ini melahirkan kemaun dan sikap untuk rela berkorban serta berjuang demi kelompoknya (*willingness to fight and die for in-group*). Sedang terhadap kelompok luar, memandang sebaliknya: yaitu dianggap sebagai kelompok rendah dan *inferior* (*as contemptible, immoral, and inferior*), yang melahirkan sikap ketidakpercayaan terhadap kelompok lain dan takut keluar dari kelompok (*distrust and fear of the out-group*) (Arifin, 2015: 9).

Yang kedua adalah jarak sosial. Jarak sosial merupakan *paradox* kedua dalam hubungan *in-group* dan *out-group*. Jarak sosial muncul dari *stereotip* dalam pandangan dimensi kemutlakan dan kebenaran ajaran agama. Pandangan (kemutlakan dan kebenaran ajaran agama) ini melahirkan *truth claim*. *Truth claim* atau klaim kebenaran yang menegaskan kebenaran lainnya. Karena pencitraan (*image*) negative terhadap kelompok atau kepercayaan, kebenaran agama lain. Klaim kebenaran menghasilkan suatu sikap teritorialisasi secara *rigid* (baca, kaku) antara pemahaman yang benar dan yang salah. Dan untuk memasuki dan diakui sebagai sebuah pemahaman yang “benar” harus melalui persyaratan yang ketat. Sikap ini yang kemudian disebut sikap konservatisme yang ditandai dengan kecenderungan mempersempit basis teologis dalam mendefinisikan iman, islam dan memperluas basis bagi kufur.

Jelas sekali bahwa sikap konservatisme akan menggerogoti identitas dan nasionalisme suatu bangsa. Kunci penguatan identitas dan nasionalisme bangsa tersebut ada pada pendidikan. Berkaca pada Negara China, Jepang, dan Korea Selatan, (Rukmana, 2015: 3) tiga Negara yang tergolong Negara Maju tersebut, tidak kehilangan identitas dan

budaya nasionalnya. Bahkan identitas serta budaya nasional negara tersebut justru diekspor ke luar. Bagaimana kita melihat budaya *K-Pop* menjadi sangat familiar di seluruh belahan bumi (Manhan, 2016: 28). Bagaimana semangat *Bushido* menjadi model dalam pengelolaan manajemen dan perusahaan-perusahaan besar (Inazo Nitobe, 2015). China hanya membutuhkan waktu 30 tahun untuk menjadi negara maju mengalahkan Amerika. Jepang butuh 40 tahun untuk menjadi negara maju dan diperhitungkan dunia. Dan negara-negara tersebut maju dengan tidak meninggalkan identitas dan nasionalismenya.

Adanya *political will* yang kuat dalam membangun pendidikan dicontohkan oleh Finlandia. Negara yang memiliki *rating* tertinggi tingkat PISA dan kesejahteraan rakyatnya tersebut, tidak mencampurkan kebijakan pendidikannya dengan politik. Di Finlandia Kebijakan Pendidikan tidak terpengaruh oleh politik penguasa. Kebijakan pendidikan di Finlandia dipegang tersendiri oleh badan otonom. Dan sudah 40 tahun kebijakan di Finlandia tidak berubah secara drastis.

Lalu bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia? Ukuran yang paling mudah untuk melihat pendidikan di Indonesia adalah hasil test PISA (*Programme for International Student Assessment*). PISA mengukur tiga kecakapan siswa: pemahaman literasi, kemampuan logika melalui matematika dan penggunaan teknologi dan sains. Hasil dari test PISA tersebut menempatkan Indonesia pada jajaran negara papan bawah. Hasil survey PISA khususnya pada bidang matematika dan membaca tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara di dunia yang disurvei PISA (HU Kompas 5/12, 2015).

Namun demikian, kita sepakat bahwa kunci untuk memperkuat identitas bangsa serta kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa profesional gurunya. Faktanya guru kita tidak atau belum menjadi guru yang betul-betul memiliki kemampuan profesional dalam profesinya (*Media Indonesia*, 2015.) Hal ini sering kali terlihat dalam praktek pembelajaran yang berlangsung hanya pada transfer *knowledge* atau pengetahuan. Padahal dalam konteks pendidikan, semestinya yang dilakukan di sekolah dan di ruang kelas adalah penanaman nilai dan kemampuan siswa merefleksikan pengalaman hidupnya. Refleksi pengalaman hidup tersebut akan tergambar dalam skill yang dimiliki siswa serta kemampuan logiknya dalam menyelesaikan persoalan. Inilah yang belum terlihat dalam sistem Pendidikan di Indonesia yang sangat bergantung dari fluktuasi politik penguasa (Tilaar, 2003: 69, 140.)

Guru sebagai objek dari kebijakan pendidikan seolah tidak berdaya dari apa yang diberikan penguasa. Kurikulum yang ada, menjadi "kitab suci" bagi guru dalam proses pembelajaran di kelas. Guru sendiri tidak dibekali bagaimana dia mengelola proses pendidikan dan kurikulum tersebut. Akibat dari ketidakmapanaan sistem pendidikan di Indonesia ini adalah politisasi pendidikan dan guru. Politisasi pendidikan dan guru yang ditopang pelaksanaan sistem otonomi daerah menyebabkan guru selalu menjadi objek dan sasaran intimidasi pada setiap prosesi politik pemilihan kepala daerah (Tilaar, 2016: 224)

Penguatan identitas, nasionalisme dan kebudayaan bangsa menjadi penting diperhatikan oleh dunia pendidikan berkaitan dengan pengaruh globalisasi. Globalisasi yang diartikan Anthony Giddens sebagai intensifikasi dari hubungan sosial di dunia yang

menghubungkan berbagai lokalitas dan saling keterpengaruhannya antar peristiwa di berbagai tempat terpisah. Globalisasi juga diartikan Frederic Jameson adalah suatu refleksi dari meluasnya komunikasi di dunia, berkembangnya pasar bebas. David Held mendefinisikan globalisasi adalah proses transformasi dalam berbagai organisasi spasial yang terhubung dalam hubungan sosial serta berbagai transaksi yang terjadi di dalamnya (Tilaar, 2012: 18).

Globalisasi adalah liberalisasi dan integrasi dari pasar bebas. Globalisasi adalah proses yang tidak bisa dihindari dan tidak dapat ditanggihkan. Interkonektivitas yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi menjadi ciri dari globalisasi. Penguatan pasar bebas dan budaya global menjadi medium penyebaran paham globalisme yang diprakarsai oleh *multi national corporate*.

Globalisasi hakekatnya adalah mengumpulkan kekuatan material oleh *multinational corporate* untuk menguasai cara berfikir, bersikap dan berperilaku serta mempengaruhi budaya masyarakat. Globalisasi akan melahirkan manusia tanpa jiwa. Sebab mereka hanya akan mendengarkan budaya kosmopolitan yang tidak berakar pada budaya lokal. Menurut George Ritzer globalisasi sebenarnya merupakan suatu arus perubahan tanpa jiwa (*globalization for nothing*) (Tilaar, 2012: 38). Pancasila adalah jawaban dari arus perubahan yang tanpa jiwa tersebut. Pancasila adalah *basic personality* dari bangsa Indonesia yang harus dikuatkan.

Pendidikan seharusnya menguatkan kembali akar budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh globalisasi dalam pendidikan adalah adanya pendidikan yang hanya melayani kelas kapitalis. Atau justru sebaliknya pendidikan diadakan untuk melayani kebutuhan tenaga-tenaga

yang dibutuhkan oleh *multinational corporate*. Di mana para siswa yang dihasilkan tidak memiliki daya tawar kuat berhadapan sistem fleksibilitas pasar kerja atau *out shourching* yang menjadi ideologi *multinational corporate* (Tjandraningsih, 2014: 93-108).

Pendidikan di era globalisasi seharusnya menekankan pada tumbuhnya pribadi yang terikat kepada norma-norma etnisitas atau kearifan lokal yang berkembang sesuai perkembangan zaman dan pribadi yang mempunyai identitas sebagai kelompok bangsa tertentu. Untuk menumbuhkan pribadi yang memiliki identitas budaya dalam menghadapi globalisasi tersebut dibutuhkan pendidikan yang trasformatif. Yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan pribadi dalam memilih secara personal berbagai pengaruh di era globalisasi saat ini. Dan tidak hanyut dalam arus globalisasi (Tilaar, 2007: xxv). Dan dasar-dasar *local wisdom* yang utama tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.

Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia dengan 740 suku bangsa dan terpaan gelombang globalisasi yang tanpa jiwa tersebut serta terpaan ideologi trans nasional Pancasila harus menunjukkan watak keabadiannya. Watak keabadian Pancasila adalah kemampuan untuk bertahan, menjawab dan diimplementasikan semua nilai-nilai yang ada di dalamnya ketika berhadapan dengan arus budaya global dan ideologi trans nasional.

Karl Marx yang melahirkan teori besar terkait kelas sosial berjouis dan proletar melahirkan ideologi politik komunis. Sementara kapitalisme melahirkan liberalisme dan konsep pasar bebas. Yang mengagungkan *laissez faire* yaitu biarkan pasar bergerak sekehendaknya di mana pemerintah tidak

boleh melakukan campur tangan. Konsep Marxisme dan Kapitalisme tersebut tercermin dalam setiap aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial negara yang menganutnya. Sebagai contoh di negara-negara barat yang menganut model kapitalis pasar bebas, melahirkan konsep penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan dan hak-hak individu. Kapitalisme pasar bebas juga ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan berbagai perusahaan berskala global atau *multinational corporate* seperti yang telah disebutkan di atas.

Maka kemudian, ideologi-ideologi tersebut memiliki kepanjangan tangan dan basis implementasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Bahkan ideologi-ideologi tersebut mampu melahirkan model struktur keilmuan baru dalam setiap sistem yang menggunakannya. Kemampuan menurunkan teori yang aplikatif dan ditunjang oleh struktur keilmuan yang sah menjadikan ideologi kapitalis memiliki watak keabadian.

WATAK KEABADIAN PANCASILA

Sebagai idologi, Pancasila digali dari khazanah kebudayaan, sejarah kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih tetap aktual dan relevan dengan kehidupan saat ini dan yang akan datang. Lalu kenapa justru saat ini Pancasila seolah kehilangan watak keabadiannya? Hal yang sama semestinya dimiliki oleh Pancasila. Watak keabadian mutlak harus dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi dengan cara melahirkan teori sosial, politik dan ekonomi baru yang berbasis Pancasila. Ini watak keabadian yang *pertama* Pancasila, yaitu menurunkan turunan teoritik Pancasila dalam semua aspek kehidupan sosial,

politik dan ekonomi.

Selain persoalan orde baru *phobia* pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam hal ini pemegang kekuasaan. Pancasila tidak diterjemahkan dan tidak diturunkan menjadi teori-teori sosial ekonomi dan politik yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya Hatta telah mencoba menurunkan teori baru sebagai ejawantah dari Pancasila yaitu ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Sayangnya teori ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada sistem ekonomi Koperasi (Anwar Abbas, 2010, 218).

Watak keabadian Pancasila juga mutlak diperlukan manakala melihat rapuhnya ideologi Pancasila berhadapan dengan kemungkinan munculnya konflik dalam masyarakat Majemuk. Hal tersebut didasarkan atas penelitian Berghe yang mengemukakan enam karakteristik dasar masyarakat majemuk: 1) adanya kelompok-kelompok yang tersegmentasi dalam sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain; 2) adanya lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer sebagai bagian dari struktur social; 3) tidak adanya konsensus bersama terhadap nilai-nilai dasar; 4) konflik antar kelompok; 5) ketergantungan di bidang ekonomi dan paksaan menjadi alat untuk integrasi social; 6) dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok lain (Arifin, 2015: 13). Teori Berghe terkait masyarakat majemuk ini menguatkan distorsi dan rapuhnya Pancasila sebagai ideologi. Tidak adanya pengembangan konsensus terhadap nilai-nilai Pancasila menyebabkan Pancasila di era reformasi kehilangan elan vitalnya. Sebaliknya pada era Orde Baru Pancasila dijadikan alat penekan untuk menjadi alat integrasi dan dominasi politik dengan jargon *Pancasilais* dan *Anti Pancasila*. Padahal adanya

pengembangan konsensus terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan syarat *kedua* watak keabadian Pancasila.

Dalam konteks menjaga watak keabadian Pancasila sebagai ideologi yang ketiga adalah membangun *framing* baru Pancasila sebagai ideologi. *Framing* baru yang dimaksud adalah setara dengan teorisasi Pancasila dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Namun dalam *framing* lebih operasional dan diturunkan dari teorisasi yang telah dihasilkan. Sebagai contoh bagaimana Pancasila dimaknai dalam konteks kehidupan generasi muda saat ini yang sangat terpengaruh oleh teknologi informasi. Atau bagaimana kelas menengah Indonesia memaknai Pancasila sebagai ideologi negara yang tetap *up to date* pada zamannya. Inilah yang penulis maksud Pancasila diinterpretasikan dan diimplementasikan secara *fashionable*.

Kemandirian sebagai bangsa dengan menguatkan Ideologi Pancasila adalah martabat bangsa. Melaksanakannya Pancasila secara murni dan konsekuen adalah menjadi *muruh* (kehormatan) bangsa. Sebab jika menilik kehidupan generasi muda saat ini, mereka sudah tercabut dari akar budaya Pancasila dan lebih familiar dengan budaya global. Inilah pentingnya *framing* untuk kalangan generasi muda saat ini.

Framing Pancasila juga berarti bagaimana Pancasila diterjemahkan ke dalam sebuah sistem *sosio-cultural* yang menjadi *added value*, untuk melawan globalisasi yang berwatak individualis, liberal dan kapitalistik. Mengartikulasikan sila-sila dalam Pancasila ke dalam perikehidupan dan mental masyarakat. Karena itu dibutuhkan strategi budaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dan salah satunya melalui strategi penguatan wawasan ke-

Indonesiaan baik secara geografis, sosial dan budaya (Swasono, 2015: 101, 138, 200, 206).

Salah satu pilar yang akan menguatkan Pancasila adalah kelas menengah (Afif, 2015: 14-25.) yang memahami Pancasila. Inilah momentum yang sangat baik untuk menguatkan Indonesia di tengah bonus demografi yang rapuh (Victoria Fanggidae, 2016: 7). Kelas menengah yang memahami ideologi Pancasila yang ditunjang kemampuan teknologi informasi yang tinggi akan mampu menginterpretasikan Pancasila secara aktual dan *fashionable* dalam arti sesuai dengan perkembangan budaya namun tetap merujuk kepada inti dasar nilai Pancasila.

Keabadian Pancasila yang keempat manakala Bangsa Indonesia mampu merumuskan pelaksanaan Nilai-Nilai Pancasila secara murni dan konsekuen (Susanto, 1985: 220). Dalam mengukur pelaksanaan sila-sila Pancasila beberapa alat ukur yang banyak digunakan oleh berbagai lembaga bisa dijadikan rujukan. Seperti untuk mengukur Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menggunakan model *Economic Islamicity Index* (EII). Untuk mengukur sila pertama juga bisa menggunakan indeks kebebasan beragama. Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bisa menggunakan *Sosial Progress Index* (SPI). Sila Keempat menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Sila Kelima menggunakan Rasio Gini (*Kompas*, 18/09/2016: 7) Adapun untuk Sila Ketiga bisa dilihat dari *comfort zone* (zona nyaman) masyarakat Indonesia yang lebih nyaman menyebut seumat, seagama sederhana. Tidak atau belum nyaman menyebut diri sebangsa, dan setanah air. Sebab memang menjadi sebangsa adalah proses yang terus menerus untuk menjadi Indonesia (Karman, 2015: 3). Perasaan nyaman yang masih bersifat etnisitas atau

tribalisme (Tilaar, 2007: 25) ini juga diperkuat dengan sistem otonomi yang mengedepankan putra daerah, agama atau etnis tertentu dalam sistem pemerintahan otonomi.

Pancasila sebagai landasan pendidikan di Indonesia juga melandasi pendidikan Islam. Di awal telah dijelaskan bahwa nilai-nilai Islam adalah *compatible* dengan nilai-nilai Islam, namun Pancasila tidak bisa *substitusi* atau menjadi pengganti dari pada agama. Dalam konteks ini perlu strategi budaya untuk menguatkan Pancasila melalui Pendidikan Islam (Mahmud 2008: 103).

Strategi budaya yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan ideologi Pancasila dalam pendidikan sesuai kondisi dan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat serta kondisi peserta didik. Di sini ditekankan bahwa bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu “nalar berfikir dan nalar nilai” yang digunakan dalam pendidikan Islam selain “nalar agama” (Arif, 2008: 103).

Keduanya saling berinteraksi satu sama lain dengan ideal tanpa harus berseberangan. Dalam konteks ini, “nalar fikir dan nalar nilai Pancasila” bisa jadi adalah bagian dari buah “nalar agama” yaitu afeksi berupa perilaku mulia atau akhlak (nalar akhlak). Bagaimana Pendidikan Islam memandang Pancasila sebagai satu kesatuan utuh dalam proses pendidikan untuk saling menguatkan dan menegaskan pentingnya nalar fikir dan nalar nilai yang selaras dengan nalar agama/akhlak.

Nalar agama yang lebih kepada nalar akhlak sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan dalam Islam merupakan pemikiran dominan dalam pendidikan Islam saat ini, Pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak yang

berorientasi kepada keluhuran moral-etik. Dalam konteks ini pendidikan dalam Islam adalah proses pembentukan dan pembinaan akhlak. Sehingga pendidikan dalam konsep nalar akhlak, hanya sebagai pewarisan budaya.

Faktanya pendidikan agama dalam konteks nalar akhlak tersebut belum terbukti keandalannya dalam membangun moral bangsa. Kejujuran, kedisiplinan dan sikap positif lainnya belum terlihat kuat sebagai hasil dari pendidikan agama. Selain itu model pembelajaran yang bertumpu pada metode ceramah (monolog) menjadi budaya praksis pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan agama. Hal mana yang disebut oleh Tilaar (1999: 105-107) sebagai budaya intelektualisme verbalis.

Model pendidikan monolog dalam pendidikan menyebabkan pendidikan termasuk pendidikan agama *lepas konteks* dari "keindonesiaan yang bhineka" sebagai sebuah realitas. Nuansa keindonesiaan yang bhineka tersebut seharusnya hadir di dalam kelas-kelas dan proses pembelajaran pendidikan agama. Nuansa keindonesiaan yang bhineka adalah salah satu *sari pati* dari Pancasila.

Tantangan untuk pendidikan Islam mengartikulasikan nilai-nilai keindonesiaan yang bhineka dalam praksis pembelajarannya. Sekaligus mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari nalar akhlak pendidikan Agama Islam (Miskawayh, 1985: 12-17). Pendidikan Agama Islam juga harus mampu memberikan jawaban atas tantangan reformasi dan globalisme yang melahirkan generasi tanpa jiwa, menjadi generasi yang memiliki karakter positif, memiliki kesadaran religious yang kuat, mampu bersaing di era global serta mampu menentukan pilihannya sendiri dengan tepat dan benar (Azra, 2002: 43).

PENUTUP

Identitas kebangsaan masyarakat Indonesia sebagai kepribadian bangsa belum terbentuk dari sistem budaya masyarakat Indonesia. Padahal nasionalisme Indonesia dikembangkan dari identitas dan budaya lokal/etnis dan puncaknya adalah identitas bangsa Indonesia. Kemunculan identitas budaya lokal/daerah sebagai unsur penting dalam membangun budaya bangsa adalah fondasi identitas dan nasionalisme.

Penguatan identitas, nasionalisme dan kebudayaan bangsa menjadi penting diperhatikan oleh dunia pendidikan berkaitan dengan pengaruh globalisasi. Sebagai idologi, Pancasila digali dari khazanah kebudayaan, sejarah kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih tetap aktual dan relevan dengan kehidupan saat ini dan yang akan datang. Hal yang sama semestinya dimiliki oleh Pancasila.

Dalam hal ini, ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk membangun watak keabadian pancasila, yaitu: 1) menurunkan turunan teoritik Pancasila dalam semua aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi; 2) pengembangan konsensus terhadap nilai-nilai Pancasila; 3) membangun *framing* baru Pancasila sebagai ideologi; dan 4) merumuskan pelaksanaan Nilai-Nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Penguatan ideologi pancasila mesti dilakukan secara simultan melalui pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia tidak tercerabut dari budayanya. Dalam hal ini, pendidikan Islam juga berperan penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia dengan ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar, 2010, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al-Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia,
- Abdullah, Irwan, 2006, "Dari Bounded Sistem ke *Borderless Society*: Krisis metode antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini", *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol 30, no 2,
- Afif, Syaiful, 2015. *The Rising of Middle Class in Indonesia: Opportunity and Challenge*, *Perencanaan Pembangunan*,
- Anyon, Jean, 2011, *Marx and Education* Routledge: Taylor & Francis,
- Arief, Mahmud, 2008, *Pendidikan Islam Transformatif* Yogyakarta: LKiS,
- Arifin, Syamsul, 2015, *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia* Malang: Intrans Publishing,
- Azra, Azyumardi, 2002. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos
- Bakar, M. Yunus Abu, 2012. *Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Tsaqafah.
- Basri, Faisal, 2013, *Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru, Negara, Pasar, dan Cita-Cita Kebangsaan* Jakarta: Pusat Paramadina
- Dantes, Nyoman, 2006, "Perspektif Kebijakan Pendidikan Dalam Menghadapi Tantangan Global", *Makalah*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Fanelli, Carlo dan Bryan Evan, 2015. "Capitalism in the Classroom: The Commodification of Education", *Alternative Routes: A Journal of Critical Social Research*, vol 26,
- Fanggidae, Fictoria, "Sinyal, Tanda Bahaya IPM Indonesia", *Kompas*, 2/09/2016
- Karman, Yonky, 2015. "Pancasila Cita-Cita Indonesia" Catatan Diskusi (Jakarta: Education and Kultur Forum (JEF), Kompas, 01/10/2016
- Maarif, Ahmad Syafi'i, 2009, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* Jakarta: Maarif Institute
- Marbawi, Mahnan, 2016, *Jakarta Education and Kultur Forum (JEF)*
- _____, 2015, "Daya Semai Guru Lemah", *Media Indonesia*.
- _____, 2016, *Penguatan Pendidikan Nasional Berbasis Pendidikan Multikultur, Pancasila dan Penguatan Jati Diri Bangsa: Sebuah Catatan Diskusi* (Jakarta: Education and Kultur Forum (JEF),
- Miskawayh, Ibn, 1985. *Tahzib al-Akhlaq fi al-Tarbiyah*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiah
- Nitobe, Inazo, 2015. *Bushido The Soul of Japan*, New York: Putman's Sons
- Rukmana, Aan dan Edi Lembong, 2015, *Penyerbukan Silang Antarbudaya, Membangun Manusia Indonesia* Jakarta: Elekmedia Komputindo,
- Salim, Emil, 2016. *Bangun Bangsa Pancasila*, Jakarta: Kompas
- Sunoto, 1982. *Mengenai Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Fak Ekonomi UII Yogyakarta
- Susanto, Nugroho Noto, 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, Jakarta Balai Pustaka,

- Swasono, Sri Edi, 2015. *Keindonesiaan Keberdaulatan dan Kemandirian*, Yogyakarta: Univ Sarjana Wiyata Press
- Tilaar, H.A.R., "Perguruan Tinggi dan Kebudayaan", Mahnan Marbawi, ed., 2016, *Penguatan Pendidikan Nasional Berbasis Pendidikan Multikultur dan Pancasila*, Jakarta: Education and Kultur Forum,
- _____, *Guru Kita: Artis Karakter & Kecerdasan* Jakarta: Lamalera, 2016
- _____, 2012, *Kaledoskop Pendidikan Indonesia: Kumpulan Karangan*, Jakarta: Kompas Gramedia,
- _____, 2003, *Kuasaan dan Pendidikan* Magelang: IndonesiaTera,
- _____, 2007, *Mengindonesia: Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta,
- _____, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* Bandung: Remaja Rosdakarya,
- _____, 2012, *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional* Jakarta: Kompas Gramedia,
- Tjandraningsih, Indrasari, 2014, "Pasar Kerja Fleksibel dan Keadilan bagi Kaum Pekerja", dalam Faisal Basri, *Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru, Negara Pasar, dan Cita-Cita Keadilan*, Jakarta, Pusat Paramadina
- Zamakhsyari Dhofier, 1994. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES

